



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1

TA. 2026

PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, dan prestasi serta penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih pada triwulan I tahun 2026.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Pusat Mutu Produksi Primer. Secara umum, triwulan 1 tahun 2026 sebagian besar target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 April 2026
Kepala Pusat Mutu Produksi Primer,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Muhammad Hatta Arisandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	3
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II Perencanaan Kinerja.....	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
3.2.1 Sasaran Strategis 1	13
3.2.2 Sasaran Strategis 2	47
BAB IV Penutup	60
Lampiran... ..	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat PPM Primer.....	3
Gambar 2. <i>Balance Scorecard</i>	3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer TA.2026	10
Tabel 2.	Tabel ikhtisari capaian kinerja TA. 2026	12
Tabel 3.2	Pencapaian IKU. 1	16
Tabel 3.3.	Pencapaian IKU. 2	19
Tabel 3.4	Pencapaian IKU. 3	25
Tabel 3.5	Pencapaian IKU. 4	29
Tabel 3.6	Pencapaian IKU. 5	34
Tabel 3.7	Pencapaian IKU. 6	44
Tabel 3.8	Pencapaian IKU. 7	46
Tabel 3.9	Pencapaian IKU. 8	48
Tabel 3.10	Pencapaian IKU. 9	49
Tabel 3.11	Pencapaian IKU. 10	50
Tabel 3.12	Pencapaian IKU. 11	51
Tabel 3.13	Pencapaian IKU. 12	52
Tabel 3.14	Pencapaian IKU. 13	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Pusat Mutu Produksi Primer pada triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 108,8%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Mutu Produksi Primer yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Dari 13 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2026, dengan rincian 8 IKU (triwulan) dan 5 IKU (tahunan) sebagai berikut realisasi capaiannya :
 - a. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB (Triwulan; Target 71%; Realisasi 76,23%)
 - b. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (Triwulan; Target 70%; Realiasi 71,71%)
 - c. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (Triwulan; Target 75%; Realisasi 69,56%)
 - d. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (Triwulan; Target 75%; Realisasi 69,22%)
 - e. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (Triwulan; Target 72%; Realisasi 75,89%)
 - f. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (Triwulan; Target 71%; Realisasi 76,39%)
 - g. Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (Tahunan; Target 1 Kebijakan; Realisasi - kebijakan)
 - h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Triwulan; Target 86%; Realisasi 100%)
 - i. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 100; Realisasi -)
 - j. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 86,20; Realisasi -)
 - k. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 92,1; Realisasi -)
 - l. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 81,75; Realisasi -)
 - m. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (Tahunan; Target 82,5; Realisasi -)

2. Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 5 IKU (75%) yang pencapaiannya memenuhi target, 2 IKU (25%) yang pencapaian target tidak terpenuhi dan 6 IKU yang pencapaian didapat pada akhir tahun.
3. Untuk 6 IKU yang pencapaiannya tahunan atau didapat pada akhir tahun 2026, pada laporan kinerja triwulan ini tidak akan dibahas.
4. Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer sampai dengan triwulan I pada tahun 2026 sebagai berikut :
 - Alokasi anggaran Pusat Mutu Produksi Primer tahun anggaran 2026 sebesar **Rp. 2.168.430.000,-** . Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2026 (TW1) sebesar Rp. 269.719.167,- (**16,06%**).
 - Faktor yang kendala dalam hal penyerapan anggaran yang tidak sesuai target periode Triwulan I antara lain :
 - Efisiensi anggaran pada pagu anggaran kegiatan teknis Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp 489.170.000,-, sehingga alokasi yang dapat dipergunakan sebesar Rp. 1.679.673.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi BPPMHKP berkaitan terselenggaranya pengendalian dan penawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan menjamin mutu hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Mutu Produksi Primer dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang di lingkungan Pusat Mutu Produksi Primer serta sarana untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

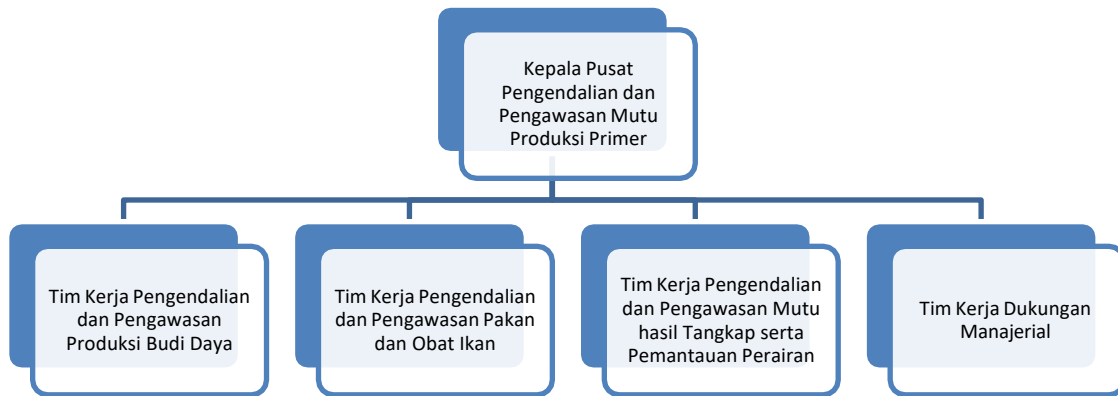
Pusat Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Mutu Produksi Primer menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
2. Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Mutu Produksi Primer.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer dipimpin oleh Kepala Pusat dibantu oleh:

1. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya;
2. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Pakan dan Obat Ikan;
3. Ketua tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Tangkap serta Pemantauan Perairan;
4. Ketua tim kerja Dukungan Manajerial;

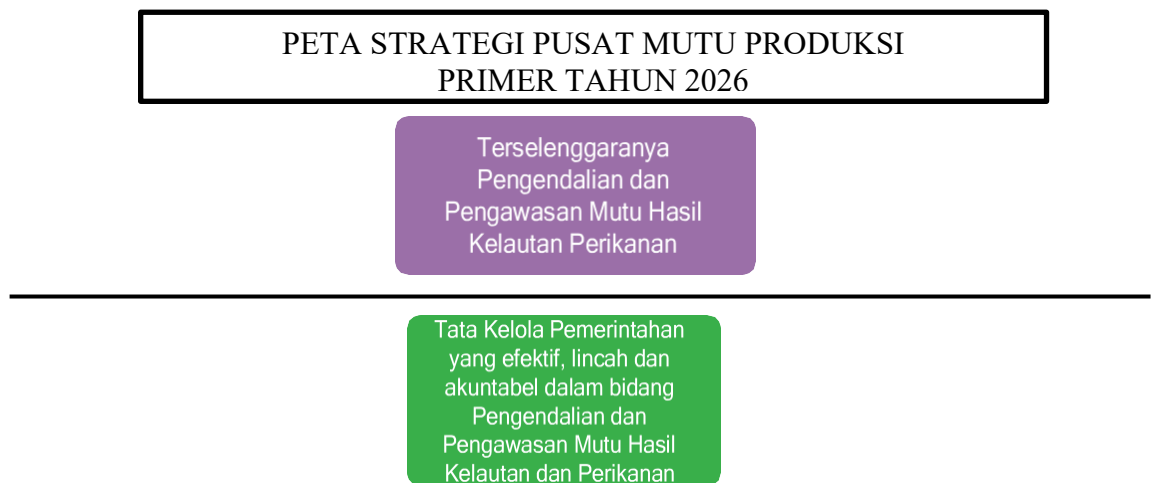
Jumlah SDM aparatur Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer sampai dengan tahun 2026 sebanyak 33 orang, terdiri dari: 1 orang Kepala Pusat, 4 orang Ketua Tim Kerja, Fungsional 24 orang dan dibantu dengan pegawai P3K 5 orang. Struktur organisasi Pusat Mutu Produksi Primer dapat dilihat pada Gambar I.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Mutu Produksi Primer

1.3 Sasaran, indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2026 ditunjukkan dibawah ini :



Gambar 2. Peta Sasaran Strategi Pusat Mutu Produksi Primer tahun 2026

Tabel 1. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Pusat Produksi Primer Tahun 2026

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2026
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB(%)	71
		2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	71
		3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	75
		4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)	75
		5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	72
		6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (%)	71
		7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (kebijakan)	1
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi (%)	86
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86,20
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92,1
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	81,75
		13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	82,5

1.4 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan 1 Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, dan capaian kinerja;
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Pusat Mutu Produksi Primer, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pusat Mutu Produksi Primer;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Di samping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pusat Mutu Produksi Primer untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi, Misi dan Tujuan Pusat Mutu Produksi Primer, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan selaras dengan visi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi Pembangunan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025–2029, KKP terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. ;
2. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur ;
3. Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas ;
4. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri ;
5. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan ;
6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

1. Asta Cita 1: Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi

BPPMHKP menjalankan fungsinya untuk mendukung ketahanan pangan laut nasional melalui:

- Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagai salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia.
- Pengendalian cemaran biologis, kimia, dan fisik dalam produk perikanan agar memenuhi standar pangan nasional dan internasional.
- Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, melalui penerapan sistem jaminan mutu (HACCP, GMP, SSOP) serta fasilitasi sertifikasi untuk ekspor.

2. Asta Cita 2: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan UMKM

BPPMHKP menerjemahkan butir ini melalui:

- **Sertifikasi mutu hasil perikanan** yang berdampak langsung terhadap peningkatan nilai jual hasil tangkapan dan budidaya nelayan serta pembudidaya ikan.
- Bimbingan teknis (Bimtek) dan fasilitasi penerapan sistem mutu kepada UMKM pengolah hasil perikanan, agar mampu memenuhi standar ekspor.
- Fasilitasi sistem traceability dan standar mutu global, sebagai upaya membuka akses pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara dengan regulasi ketat.

3. Asta Cita 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah

BPPMHKP mendukung penguatan pembangunan wilayah maritim dan pesisir melalui:

- Pembangunan dan penguatan Sentra Mutu Hasil Perikanan (SMHP) di wilayah pesisir, pulau kecil, dan daerah tertinggal.
- Peningkatan akses laboratorium pengujian mutu dan residu, sehingga pelaku usaha daerah dapat melakukan uji mutu tanpa tergantung pada fasilitas di kota besar.
- Peningkatan kapasitas SDM mutu di daerah, melalui pelatihan, sertifikasi auditor mutu, dan penyuluhan langsung.

4. Asta Cita 7: Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Efektif

Untuk mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik, BPPMHKP berkontribusi melalui:

- Digitalisasi layanan sertifikasi mutu dan ekspor, seperti pengembangan Sistem e-Certification, e-Logbook, dan integrasi dengan INSW.
- Penguatan sistem pengawasan mutu berbasis risiko dan teknologi, untuk efisiensi dan transparansi.
- Kolaborasi lintas lembaga (Bea Cukai, Badan POM, Kemenkes, dan Kementerian Perdagangan) dalam pengendalian mutu, keamanan pangan, dan pengawasan pasar.

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan perikanan (BPPMHKP) merumuskan tujuan terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sebagai berikut:

1. Menjamin Kepatuhan Standar Mutu

- Menyediakan sertifikasi mutu bagi unit usaha perikanan sejak tahap produksi awal hingga pascapanen.
- Memastikan produk perikanan yang dipasarkan memenuhi standar nasional dan internasional.

2. Meningkatkan Pengawasan dan Keamanan Produk Perikanan

- Melaksanakan pengawasan berkelanjutan terhadap unit usaha perikanan melalui sistem surveillance.
- Memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.

3. Meningkatkan Kapasitas Laboratorium Pengujian

- Memperluas ruang lingkup pengujian mutu dan penyediaan bahan uji yang sesuai dengan standar global.
- Menjamin laboratorium pengujian memiliki akreditasi dan mengikuti sistem manajemen mutu yang ketat.

4. Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Pengawasan

- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk efektivitas pengendalian mutu hasil perikanan.

- Mengembangkan sistem traceability untuk meningkatkan ketelusuran produk perikanan.

5. Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pangan bermutu dan aman konsumsi.
- Mendorong penerapan praktik pengolahan yang higienis dan berbasis standar keamanan pangan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Pusat Mutu Produksi Primer melakukan reviu terhadap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2025. Pada tahun 2026 Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target tahun 2026
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB(%)	71
		2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	71
		3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	75
		4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)	75
		5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	72
		6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (%)	71
		7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (kebijakan)	1
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi (%)	86
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86,20
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92,1
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	81,75
		13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	82,5

BAB III

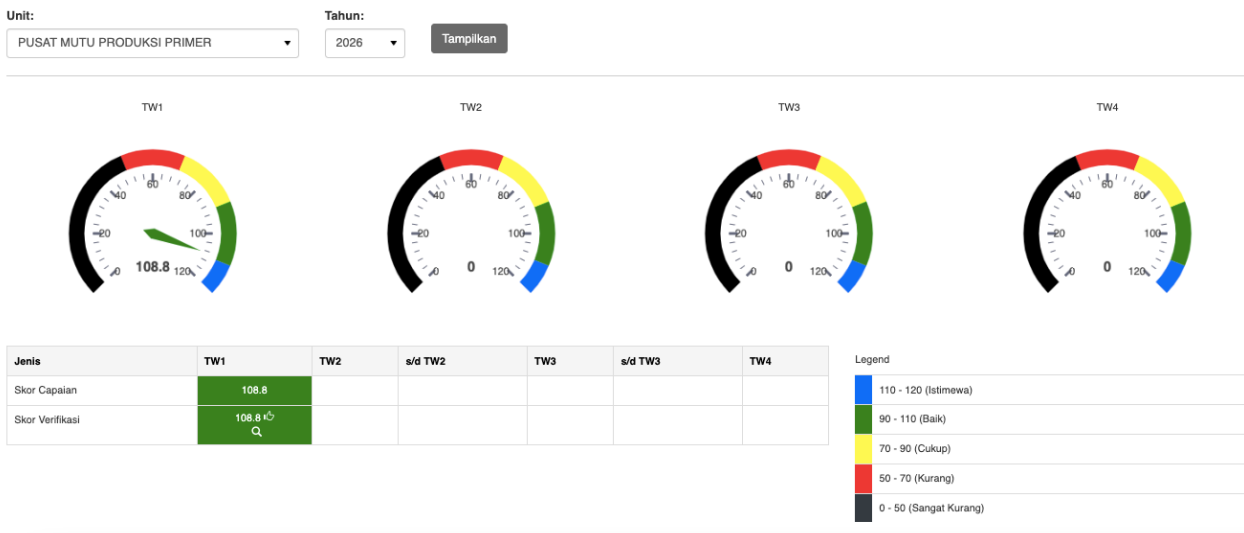
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja organisasi Pusat Mutu Produksi Primer merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh koordinator kelompok lingkup Pusat Mutu Produksi Primer. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja level II Pusat Mutu Produksi Primer, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap triwulan, dan semester dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan total ukur berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK). berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada Triwulan I tahun 2026 sudah baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 108,8%. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

Capaian kinerja Pusat Mutu Produksi Primer pada triwulan I tahun 2026 seperti pada gambar Dashboard berikut ini :



**Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer
Triwulan I Tahun 2026**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	Realisasi TW I 2026	%
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB (%)	71	76,23	107,37
		2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	70	71,71	102,44
		3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	75	69,56	92,74
		4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)	75	69,22	92,30
		5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	72	75,89	105,4
		6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (%)	71	76,39	107,59
		7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (Kebijakan)	1	-	-
2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	86	100	116,27
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100	-	-
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86,20	-	-
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92,1	-	-
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	81,75	-	-
		13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	82,5	-	-

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1

Sasaran Strategis 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKU 1. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB

Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan instrument utama dalam sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan. Implementasi CBIB memastikan bahwa seluruh proses produksi-mulai dari pemeliharaan, penanganan pakan, pengendalian penyakit, hingga panen-memenuhi prinsip food safety, traceability, animal health dan environmental sustainability.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peran CBIB berkontribusi langsung terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya:

1. Peningkatan produksi dan daya saing komoditas ekspor unggulan (udang, kepiting, rumput laut, nila dan lobster);
2. Pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan local dalam rangka pengentasan kemiskinan;
3. Penguatan sistem jaminan mutu hasil perikanan dari hulu ke hilir;
4. Implementasi ekonomi biru yang menekankan keberlanjutan ekosistem;
5. Pengembangan program budidaya tematik.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu (TE) adalah indicator yang mengukur pelaksanaan system pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap unit usaha budidaya yang telah menerapkan CBIB untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Penetapan TE dilakukan melalui penilaian terhadap bobot penilaian indikator pengawasan mutu dan indikator pengendalian mutu.

Capaian indikator tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi sebesar **76,23%**, melampaui target **71%** dan berada pada kategori **efektif**. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan unit usaha terhadap standar CBIB serta penguatan sistem jaminan mutu pada tahap budidaya (hulu), yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan keamanan produk perikanan. Capaian ini juga selaras

dengan program prioritas nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor, penguatan ketahanan pangan berbasis protein ikan, serta implementasi prinsip *blue economy*. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek konsistensi penerapan standar di seluruh unit usaha, terutama terkait pengendalian residu, biosecurity, dan sistem keterlacakan, guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja serta mitigasi risiko terhadap penolakan produk di pasar domestik maupun internasional. Penilaian dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer terhadap Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat 12 UPT memperoleh predikat **sangat efektif** dengan rentang nilai 86,00 s.d 94,17%.

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	71%							70%	71%
Realisasi	76,23%							78,22%	
%Capaian	107,37%							111,75%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

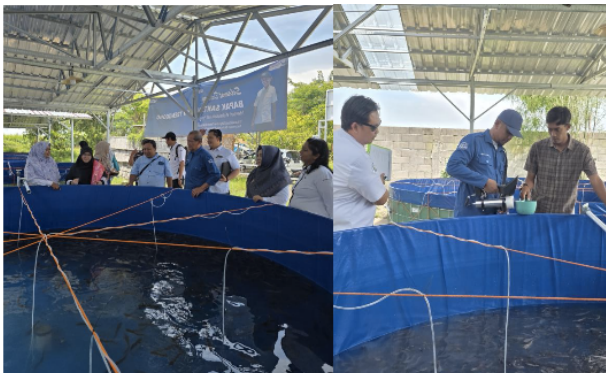
- Pra Sertifikasi di KDMP kab. Batang



- Pra Sertifikasi di KDMP kab. Madiun



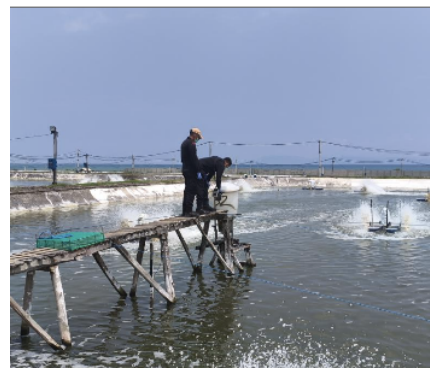
- Pra Sertifikasi di KDMP kab. Situbondo



- Pra Sertifikasi di KDMP kab. Bantul



- Asesmen lingkungan di Kampung Lobster Lombok



Lampiran Tabel Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu (CBIB) UPT BPPMHKP

No	Satuan Kerja	TE CBIB	Keterangan
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	89,44	Sangat Efektif
2	Balai PPMHKP Medan I	80,17	Efektif
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	71,00	Cukup Efektif
4	Balai PPMHKP Lampung	88,33	Sangat Efektif
5	Balai PPMHKP Jakarta	90,00	Sangat Efektif
6	Balai PPMHKP Semarang	71,00	Cukup Efektif
7	Balai PPMHKP Surabaya II	71,00	Cukup Efektif
8	Balai PPMHKP Entikong	65,00	Cukup Efektif
9	Balai PPMHHPK Balikpapan	70,00	Cukup Efektif
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	89,17	Sangat Efektif
11	Balai PPMHKP Tarakan	90,00	Sangat Efektif
12	Balai PPMHKP Denpasar	71,00	Cukup Efektif
13	Balai PPMHKP Mataram	89,44	Sangat Efektif
14	Balai PPMHKP Manado	71,00	Cukup Efektif
15	Balai PPMHKP Makassar	81,00	Efektif
16	Balai PPMHKP Ambon	70,00	Cukup Efektif
17	Balai PPMHKP Jayapura	65,00	Cukup Efektif
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	70,00	Cukup Efektif
19	Stasiun PPMHKP Medan II	71,00	Cukup Efektif
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	70,00	Cukup Efektif
21	Stasiun PPMHKP Padang	71,00	Cukup Efektif
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	94,17	Sangat Efektif
23	Stasiun PPMHKP Jambi	90,00	Sangat Efektif
24	Stasiun PPMHKP Palembang	70,00	Cukup Efektif
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	90,00	Sangat Efektif
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	88,33	Sangat Efektif
27	Stasiun PPMHKP Batam	65,00	Cukup Efektif
28	Stasiun PPMHKP Merak	88,33	Sangat Efektif
29	Stasiun PPMHKP Bandung	84,44	Efektif
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	71,00	Cukup Efektif

31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	71,00	Cukup Efektif
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	86,00	Sangat Efektif
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	65,00	Cukup Efektif
34	Stasiun PPMHKP Kupang	71,00	Cukup Efektif
35	Stasiun PPMHKP Bima	65,00	Cukup Efektif
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	66,00	Cukup Efektif
37	Stasiun PPMHKP Palu	85,00	Efektif
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	71,00	Cukup Efektif
39	Stasiun PPMHKP Kendari	70,00	Cukup Efektif
40	Stasiun PPMHKP Baubau	83,67	Efektif
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	84,17	Efektif
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	65,00	Cukup Efektif
43	Stasiun PPMHKP Ternate	65,00	Cukup Efektif
44	Stasiun PPMHKP Sorong	65,00	Cukup Efektif
45	Stasiun PPMHKP Merauke	71,67	Cukup Efektif

Link Lampiran Perhitungan :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQIIYqaUt-DAplh1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

Interprestasi hasil terhadap tingkat pengendalian dan pengawasan mutu

- Nilai ≥ 85 Sangat Efektif
- Nilai 72- 84 Efektif
- Nilai 56 - 71 Cukup Efektif
- Nilai ≤ 55 Kurang Efektif

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Tahun 2026
Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Tahun 2026

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 1

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK. 1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB										
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	64,85	71	71	76,23	107,37	107,37	71	107,37

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I sebesar 64,85%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 71%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 76,23%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 107,37%.

IKU 2. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB

Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan instrumen utama dalam sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya pada tahap hulu, khususnya dalam menghasilkan benih ikan yang bermutu, sehat, dan bebas dari kontaminan. Implementasi CPIB memastikan bahwa seluruh proses pembenihan—mulai dari pengelolaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, pemberian pakan, hingga distribusi benih—telah memenuhi prinsip *food safety*, *biosecurity*, *traceability*, serta kesehatan ikan (*fish health management*). Penerapan CPIB yang konsisten menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan produksi budidaya secara keseluruhan. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, penerapan CPIB berkontribusi langsung terhadap program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan, penguatan sistem jaminan mutu

hasil perikanan dari hulu ke hilir, serta implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan benih bermutu melalui penerapan CPIB juga mendukung pengembangan kawasan budidaya dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu (TE) pada unit usaha pembenihan yang menerapkan CPIB merupakan indikator kinerja yang mengukur sejauh mana sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah telah berjalan optimal dalam memastikan kepatuhan terhadap standar CPIB. Penilaian TE dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator pengendalian mutu dan pengawasan mutu.

Keberhasilan pencapaian target indikator tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB ditunjukkan oleh realisasi sebesar **71,71%**, yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar **70%**. Capaian ini menempatkan tingkat efektivitas pada kategori **cukup efektif (56–71)** dan berada pada batas atas menuju kategori **efektif**, sehingga mencerminkan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan mutu telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan unit usaha pembenihan dalam menerapkan standar CPIB. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan inspeksi dan pembinaan yang semakin optimal, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan prinsip mutu dan kesehatan benih. Dengan demikian, capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengawasan agar dapat mencapai kategori efektif secara konsisten pada periode berikutnya. Penilaian dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer terhadap Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat 4 UPT memperoleh predikat **sangat efektif** dengan rentang nilai 88,33 s.d 90,00%

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70%							70%	70%
Realisasi	71,71%							85,26%	
%Capaian	102,44%							121,79%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

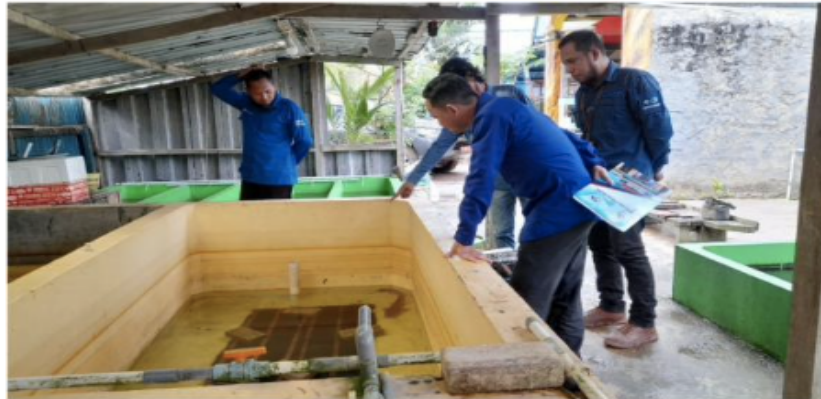
Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

- Inspeksi CPIB



- Surveilens CPIB



Lampiran Tabel Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu (CPIB) UPT BPPMHKP

No	Satuan Kerja	TE CPIB	Keterangan	17	Balai PPMHKP Jayapura	65,00	Cukup Efektif
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	71,00	Cukup Efektif	18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	70,00	Cukup Efektif
2	Balai PPMHKP Medan I	70,00	Cukup Efektif	19	Stasiun PPMHKP Medan II	70,00	Cukup Efektif
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	71,00	Cukup Efektif	20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	70,00	Cukup Efektif
4	Balai PPMHKP Lampung	71,00	Cukup Efektif	21	Stasiun PPMHKP Padang	71,00	Cukup Efektif
5	Balai PPMHKP Jakarta	70,00	Cukup Efektif	22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	77,67	Efektif
6	Balai PPMHKP Semarang	70,00	Cukup Efektif	23	Stasiun PPMHKP Jambi	90,00	Sangat Efektif
7	Balai PPMHKP Surabaya II	70,00	Cukup Efektif	24	Stasiun PPMHKP Palembang	88,33	Sangat Efektif
8	Balai PPMHKP Entikong	65,00	Cukup Efektif	25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	70,00	Cukup Efektif
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	71,00	Cukup Efektif	26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	70,00	Cukup Efektif
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	90,00	Sangat Efektif	27	Stasiun PPMHKP Batam	65,00	Cukup Efektif
11	Balai PPMHKP Tarakan	70,00	Cukup Efektif	28	Stasiun PPMHKP Merak	90,00	Sangat Efektif
12	Balai PPMHKP Denpasar	71,00	Cukup Efektif	29	Stasiun PPMHKP Bandung	85,00	Efektif
13	Balai PPMHKP Mataram	70,00	Cukup Efektif	30	Stasiun PPMHKP Cirebon	71,00	Cukup Efektif
14	Balai PPMHKP Manado	70,00	Cukup Efektif				
15	Balai PPMHKP Makassar	70,00	Cukup Efektif				
16	Balai PPMHKP Ambon	71,00	Cukup Efektif				

31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	70,00	Cukup Efektif
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	70,00	Cukup Efektif
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	65,00	Cukup Efektif
34	Stasiun PPMHKP Kupang	71,00	Cukup Efektif
35	Stasiun PPMHKP Bima	65,00	Cukup Efektif
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	65,00	Cukup Efektif
37	Stasiun PPMHKP Palu	85,00	Efektif
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	70,00	Cukup Efektif
39	Stasiun PPMHKP Kendari	70,00	Cukup Efektif
40	Stasiun PPMHKP Baubau	70,00	Cukup Efektif
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	66,00	Cukup Efektif
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	65,00	Cukup Efektif
43	Stasiun PPMHKP Temate	65,00	Cukup Efektif
44	Stasiun PPMHKP Sorong	65,00	Cukup Efektif
45	Stasiun PPMHKP Merauke	70,83	Cukup Efektif

Link Lampiran Perhitungan :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fzFfp7Wf6md8xgbTQh9TGQIIYqaUt-DAplh1Nw6pwio/edit?gid=1937912344#gid=1937912344>

Interprestasi hasil terhadap tingkat pengendalian dan pengawasan mutu

- Nilai ≥ 85 Sangat Efektif
- Nilai 72- 84 Efektif
- Nilai 56 - 71 Cukup Efektif
- Nilai ≤ 55 Kurang Efektif

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Supervisi Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Tahun 2026
Help Desk Pelaksanaan Sertifikasi Cara Budi Daya Ikan yang Baik	Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya	Tahun 2026

Tabel 3.3 Pencapaian IKU 2

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK. 2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB										
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	86,49	70	70	71,71	102,44	102,44	70	102,44

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 triwulan I sebesar 86,49%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 70%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 71,71%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 102,44%.

IKU 3. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik) dan **CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik)** merupakan standar yang saling dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat ikan, mulai dari proses produksi hingga distribusi kepada pengguna akhir. CPOIB mengatur proses produksi obat ikan yang meliputi pengolahan bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk), serta pengawasan mutu guna menghasilkan obat ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Sementara itu, CDOIB mengatur seluruh proses distribusi obat ikan agar mutu dan integritas produk tetap terjaga selama penyimpanan, pengangkutan, hingga penyaluran kepada pembudidaya ikan. Bentuk sediaan obat ikan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, serta obat alami/herbal.

Penerapan dan sertifikasi CPOIB dan CDOIB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, serta menjadi bagian dari implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP). Unit usaha produsen maupun distributor obat ikan yang telah menerapkan standar tersebut dapat mengajukan sertifikasi melalui sistem OSS RBA atau secara manual, yang kemudian diverifikasi melalui inspeksi dan penilaian kesesuaian berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan.

Penerbitan sertifikat CPOIB dan CDOIB memiliki tujuan strategis untuk menjamin mutu dan keamanan obat ikan sejak proses produksi hingga distribusi. Penerapan kedua standar ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat produk, tetapi juga untuk mencegah kontaminasi silang, kesalahan campur, serta menjaga integritas produk selama distribusi. Selain itu, sertifikasi ini berperan dalam mencegah peredaran obat ikan ilegal atau palsu, menjamin ketertelusuran (traceability), mencegah penyalahgunaan, serta melindungi pembudidaya ikan dan konsumen akhir.

Penerapan CPOIB dan CDOIB menjadi bagian penting dalam **mendukung program prioritas** Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru, **pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan**. Standar ini berkontribusi terhadap pengendalian penyakit ikan yang lebih efektif, penjaminan keamanan pangan, serta pengendalian risiko resistensi antimikroba. Di sisi lain, penerapan standar juga mendukung perlindungan lingkungan perairan dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan budidaya.

Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah indikator yang mengukur pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang telah menerapkan CPOIB-CDOIB untuk memastikan produk yang dihasilkan dan didistribusi memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%							75%	75%
Realisasi	69,56%							86%	
%Capaian	92,74%							114,67%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

IKU Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB **Target IKU 75%, Realisasi : 69,56%, dan Capaian: 92,74%.**

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu

1. Jumlah sertifikasi CPOIB yang diproses dari permohonan pelaku usaha di OSS RBA, pelaksanaan inspeksi dan rekomendasi teknis hingga terbit 4 sertifikat yang terdiri atas:
 - Sertifikat CPOIB CV Banyurejo – farmasetik dilakukan inspeksi oleh Balai PPMHKP Semarang;
 - Sertifikat CPOIB PT Medion Farma Jaya – obat alami dilakukan inspeksi oleh Stasiun PPMHKP Bandung;
 - Sertifikat CPOIB PT Sinar Hidup Satwa – farmasetik dilakukan inspeksi oleh Stasiun PPMHKP Merak;
 - Sertifikat CPOIB PT Sinar Hidup Satwa – premiks dilakukan inspeksi oleh Stasiun PPMHKP Merak.
2. Sedangkan untuk sertifikat CDOIB pada TW I belum terdapat permohonan dan kegiatan inspeksi sehingga belum ada sertifikat yang diterbitkan.
3. Berdasarkan perhitungan indikator tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu di UPT yang melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB yaitu:
 - BPPMHKP Semarang dengan kategori Sangat Efektif (88,33);
 - BPPMHKP Bandung dengan kategori Sangat Efektif (88,33);
 - BPPMHKP Merak dengan kategori Efektif (83,33);
 - 42 UPT BPPMHKP dengan katagori cukup Efektif.

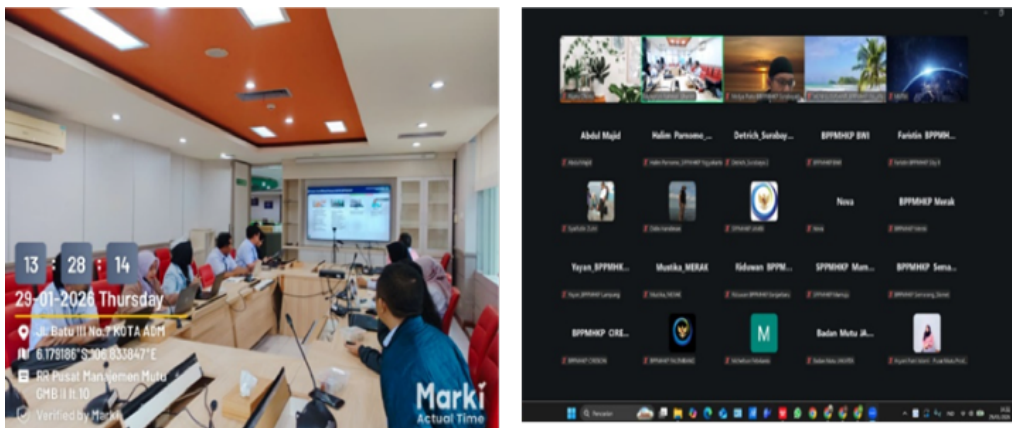
4. Berdasarkan hasil penilaian tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB–CDOIB, diketahui bahwa sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada pada kategori **cukup efektif**, yaitu sebanyak 42 UPT. Selanjutnya, terdapat 1 UPT yang masuk dalam kategori **efektif**, serta 2 UPT yang telah mencapai kategori **sangat efektif**. Sementara itu, tidak terdapat UPT yang masuk dalam kategori **kurang efektif**.
5. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu pada mayoritas UPT telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan agar lebih banyak UPT dapat mencapai kategori efektif dan sangat efektif dan/atau mencapai target indikator kinerja.

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

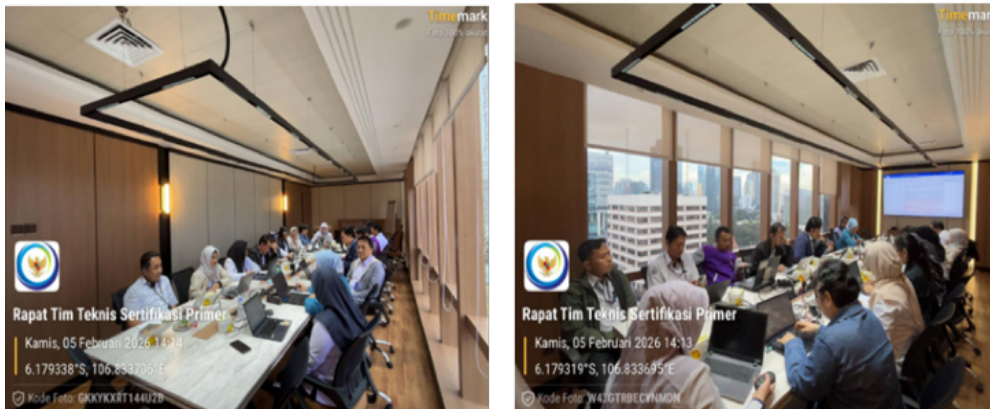
1. Pendampingan Inspeksi Sertifikasi CPOIB di PT Medion Farma Jaya Bandung pada tanggal 19-21 Januari 2026



2. Koordinasi Pelaksanaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB lingkup UPT BPPMHKP pada tanggal 29 Januari 2026 (GMB II Lt.10)



3. Pembahasan Draft SK Kaban tentang Penetapan Personil Tim Evaluasi Teknis Lingkup Pusat /UPT pada tanggal 5 Pebruari 2026 (GMB II Lt.10)



Lampiran Tabel Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu (CPOIB-CDOIB) UPT BPPMHKP

No.	Satuan Kerja	CDOIB-CPOIB	Kategori
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	70.00	Cukup Efektif
2	Balai PPMHKP Medan I	70.00	Cukup Efektif
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	70.00	Cukup Efektif
4	Balai PPMHKP Lampung	70.00	Cukup Efektif
5	Balai PPMHKP Jakarta	70.00	Cukup Efektif
6	Balai PPMHKP Semarang	88.33	Sangat Efektif
7	Balai PPMHKP Surabaya II	70.00	Cukup Efektif
8	Balai PPMHKP Entikong	65.00	Cukup Efektif
9	Balai PPMHKP Balikpapan	70.00	Cukup Efektif
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	70.00	Cukup Efektif
11	Balai PPMHKP Tarakan	70.00	Cukup Efektif
12	Balai PPMHKP Denpasar	70.00	Cukup Efektif
13	Balai PPMHKP Mataram	70.00	Cukup Efektif
14	Balai PPMHKP Makassar	70.00	Cukup Efektif
15	Balai PPMHKP Manado	70.00	Cukup Efektif
16	Balai PPMHKP Ambon	70.00	Cukup Efektif
17	Balai PPMHKP Jayapura	65.00	Cukup Efektif
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	70.00	Cukup Efektif
19	Stasiun PPMHKP Medan II	70.00	Cukup Efektif
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	70.00	Cukup Efektif

21	Stasiun PPMHKP Padang	65.00	Cukup Efektif
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	65.00	Cukup Efektif
23	Stasiun PPMHKP Jambi	70.00	Cukup Efektif
24	Stasiun PPMHKP Palembang	70.00	Cukup Efektif
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	65.00	Cukup Efektif
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	70.00	Cukup Efektif
27	Stasiun PPMHKP Batam	65.00	Cukup Efektif
28	Stasiun PPMHKP Merak	88.33	Sangat Efektif
29	Stasiun PPMHKP Bandung	83.33	Efektif
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	70.00	Cukup Efektif
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	70.00	Cukup Efektif
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	70.00	Cukup Efektif
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	65.00	Cukup Efektif
34	Stasiun PPMHKP Kupang	70.00	Cukup Efektif
35	Stasiun PPMHKP Bima	65.00	Cukup Efektif

36	Stasiun PPMHKP Mamuju	65.00	Cukup Efektif
37	Stasiun PPMHKP Palu	65.00	Cukup Efektif
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	70.00	Cukup Efektif
39	Stasiun PPMHKP Kendari	70.00	Cukup Efektif
40	Stasiun PPMHKP Bau - Bau	70.00	Cukup Efektif
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	65.00	Cukup Efektif
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	65.00	Cukup Efektif
43	Stasiun PPMHKP Ternate	65.00	Cukup Efektif
44	Stasiun PPMHKP Sorong	70.00	Cukup Efektif
45	Stasiun PPMHKP Merauke	65.00	Cukup Efektif
Jumlah		3130.00	
%Realisasi		69.56	
% Capaian		92.74	

Link Lampiran Perhitungan :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/edit?usp=sharing&oid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Interprestasi hasil terhadap tingkat pengendalian dan pengawasan mutu

- Nilai ≥ 85 Sangat Efektif
- Nilai 72- 84 Efektif
- Nilai 56 - 71 Cukup Efektif
- Nilai ≤ 55 Kurang Efektif

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Bimtek Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Helpdesk KONSolidasi Sertifikasi CPOIB dan CDOIB Pusat – UPT	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Supervisi dan/atau pemantauan dan evaluasi UPT dalam Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Pra Sertifikasi pelaku usaha produsen dan/atau distributor obat ikan secara mikro-kecil	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)

Tabel 3.4 Pencapaian IKU 3

SP.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK. 3 Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB											
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	81,25	75	75	69,56	92,74	92,74	75	92,74

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I sebesar 81,25%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 69,56%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 92,74%.

IKU 4. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB

CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik) adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

Sertifikat CPPIB merupakan salah satu bagian penting dari penerapan Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) yang dikembangkan untuk menjamin **proses produksi pakan ikan** memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan sebagaimana SNI 8227:2015/2022 tentang CPPIB. Sertifikasi CPPIB atau Perizinan Berusaha (PB) Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (UMKU) dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor KP dan Permen KP Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pakan Ikan.

Unit produsen pakan yang telah menerapkan prinsip CPPIB yang terdiri atas unit produksi pakan industri, mandiri maupun milik pemerintah dapat melakukan permohonan penerbitan sertifikat CPPIB melalui aplikasi OSS (pelaku usaha) maupun secara manual (unit pemerintah).

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%							75%	75%
Realisasi	69,22%							80,26%	
%Capaian	92,30%							107,01%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

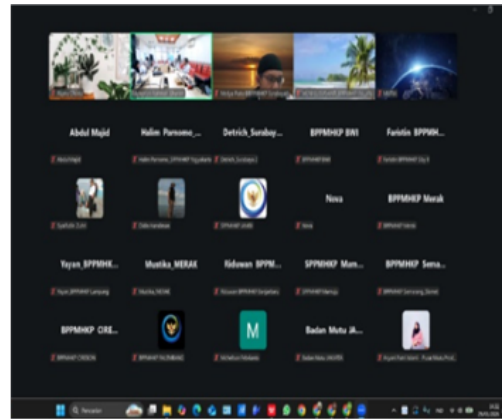
IKU Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB **Target IKU 75%, Realisasi : 69.22%, dan Capaian: 92.30%.**

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu

- Jumlah sertifikasi CPPIB yang diproses dari permohonan pelaku usaha di OSS RBA, pelaksanaan inspeksi dan rekomendasi teknis hingga terbit 4 sertifikat yang terdiri atas:
 - Sertifikat CPPIB PT. Biotechnology Indonesia unit Lampung dilakukan inspeksi oleh Balai PPMHKP Lampung;
 - Sertifikat CPPIB PT. Sinta Prima Feedmill unit Nganjuk dilakukan inspeksi oleh Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
 - Sertifikat CPPIB PT. Japfa Comfeed Indonesia unit Sidoarjo dilakukan inspeksi oleh Balai Besar PPMHKP Surabaya I.
- Berdasarkan perhitungan indikator tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu di UPT yang melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPOIB yaitu:
 - Balai Besar PPMHKP Surabaya I dengan kategori Sangat Efektif (90,00);
 - Balai PPMHKP Lampung dengan kategori Sangat Efektif (90,00);
 - 43 UPT BPPMHKP dengan katagori cukup Efektif.
- Berdasarkan hasil penilaian tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB, diketahui bahwa sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada pada kategori **cukup efektif**, yaitu sebanyak 43 UPT dan 2 UPT yang telah mencapai kategori **sangat efektif**. Sementara itu, tidak terdapat UPT yang masuk dalam kategori **Efektif** dan **kurang efektif**.
- Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu pada mayoritas UPT telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan agar lebih banyak UPT dapat mencapai kategori efektif dan sangat efektif dan/atau mencapai target indikator kinerja.

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

1. Koordinasi Pelaksanaan CPPIB, CPOIB dan CDOIB lingkup UPT BPPMHKP pada tanggal 29 Januari 2026 (GMB II Lt.10)



2. Pembahasan Draft SK Kaban tentang Penetapan Personil Tim Evaluasi Teknis Lingkup Pusat /UPT pada tanggal 5 Pebruari 2026 (GMB II Lt.10)



Lampiran Tabel Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu (CPPIB) UPT BPPMHKP

No.	Satuan Kerja	CPPIB	Kategori
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	90.00	Sangat Efektif
2	Balai PPMHKP Medan I	70.00	Cukup Efektif
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	70.00	Cukup Efektif
4	Balai PPMHKP Lampung	90.00	Sangat Efektif
5	Balai PPMHKP Jakarta	70.00	Cukup Efektif
6	Balai PPMHKP Semarang	70.00	Cukup Efektif
7	Balai PPMHKP Surabaya II	70.00	Cukup Efektif
8	Balai PPMHKP Entikong	65.00	Cukup Efektif
9	Balai PPMHKP Balikpapan	70.00	Cukup Efektif
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	70.00	Cukup Efektif
11	Balai PPMHKP Tarakan	70.00	Cukup Efektif
12	Balai PPMHKP Denpasar	70.00	Cukup Efektif
13	Balai PPMHKP Mataram	70.00	Cukup Efektif
14	Balai PPMHKP Makassar	70.00	Cukup Efektif
15	Balai PPMHKP Manado	70.00	Cukup Efektif
16	Balai PPMHKP Ambon	70.00	Cukup Efektif
17	Balai PPMHKP Jayapura	65.00	Cukup Efektif
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	70.00	Cukup Efektif
19	Stasiun PPMHKP Medan II	70.00	Cukup Efektif
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	70.00	Cukup Efektif
21	Stasiun PPMHKP Padang	65.00	Cukup Efektif
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	65.00	Cukup Efektif
23	Stasiun PPMHKP Jambi	70.00	Cukup Efektif
24	Stasiun PPMHKP Palembang	70.00	Cukup Efektif
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	65.00	Cukup Efektif
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	70.00	Cukup Efektif
27	Stasiun PPMHKP Batam	65.00	Cukup Efektif
28	Stasiun PPMHKP Merak	70.00	Cukup Efektif
29	Stasiun PPMHKP Bandung	65.00	Cukup Efektif
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	70.00	Cukup Efektif
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	70.00	Cukup Efektif
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	70.00	Cukup Efektif
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	65.00	Cukup Efektif
34	Stasiun PPMHKP Kupang	70.00	Cukup Efektif
35	Stasiun PPMHKP Bima	65.00	Cukup Efektif
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	65.00	Cukup Efektif
37	Stasiun PPMHKP Palu	65.00	Cukup Efektif

38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	70.00	Cukup Efektif
39	Stasiun PPMHKP Kendari	70.00	Cukup Efektif
40	Stasiun PPMHKP Bau - Bau	70.00	Cukup Efektif
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	65.00	Cukup Efektif
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	65.00	Cukup Efektif
43	Stasiun PPMHKP Ternate	65.00	Cukup Efektif
44	Stasiun PPMHKP Sorong	70.00	Cukup Efektif
45	Stasiun PPMHKP Merauke	65.00	Cukup Efektif
Jumlah		3115.00	
%Realisasi		69.22	
% Capaian		92.30	

Link Lampiran Perhitungan :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W29wYoHcLUaYxrWWx772Ost5cjiaxRzR/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true>

Interprestasi hasil terhadap tingkat pengendalian dan pengawasan mutu

- Nilai ≥ 85 Sangat Efektif
- Nilai 72- 84 Efektif
- Nilai 56 - 71 Cukup Efektif
- Nilai ≤ 55 Kurang Efektif

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Bimtek Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Helpdesk KONSolidasi Sertifikasi CPOIB dan CDOIB Pusat – UPT	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Supervisi dan/atau pemantauan dan evaluasi UPT dalam Pelaksanaan Inspeksi Sertifikasi CPOIB dan CDOIB	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)
Pra Sertifikasi pelaku usaha produsen dan/atau distributor obat ikan secara mikro-kecil	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan	2026 (TW II – TW IV)

Tabel 3.5 Pencapaian IKU 4

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK. 4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB											
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	66,6	75	75	69,22	92,30	92,30	75	92,30	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I sebesar 66,6%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 75%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 92,30%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 92,30%.

IKU 5. Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) merupakan bagian penting dalam Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) merupakan persyaratan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam menerima bahan baku yang berasal dari usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan berupa jaminan bahwa kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya jaminan keamanan pangan sepanjang rantai produksi hingga distribusi, penerapan CPIB pada unit usaha penangkapan dan pengangkutan ikan menjadi bagian integral dalam sistem pengendalian keamanan pangan di sektor hulu.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan juga memiliki keterkaitan strategis dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai model integrasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis kawasan. KNMP tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan, tetapi juga mendorong penerapan praktik penanganan ikan yang baik, peningkatan kualitas produk, serta penguatan akses pasar melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	72%							75%	72%
Realisasi	75,89							92,84%	
%Capaian	105,4%							120%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

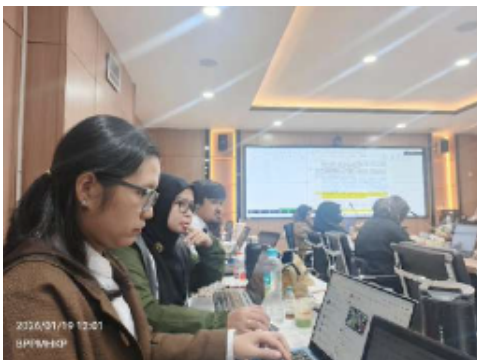
Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Target Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB yaitu 72%. Realisasi terhadap IKU tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB yaitu 75,89%. Adapun realisasi sampai dengan TW I 2026 yaitu 105,4%.

Pada TW I 2026, jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan yaitu 192 sertifikat yang dilaksanakan oleh 18 UPT BPPMHKP yaitu Balai Besar PPMHKP Surabaya I, Balai PPMHKP Ambon, Balai PPMHKP Balikpapan, Balai PPMHKP Banjarbaru, Balai PPMHKP Denpasar, Balai PPMHKP Jakarta, Balai PPMHKP Makassar, Balai PPMHKP Manado, Balai PPMHKP Semarang, Balai PPMHKP Tj. Pinang, Stasiun PPMHKP Baubau, Stasiun PPMHKP Bengkulu, Stasiun PPMHKP Kendari, Stasiun Luwuk Banggai, Stasiun PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Padang, Stasiun PPMHKP Pekanbaru, Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

1. Harmonisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari PP no.28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko



2. Pelaksanaan modelling pembongkaran ikan di 3 lokasi Pelabuhan Piloting yaitu PPS Nizam Zachman, PPS Bitung, dan Pelabuhan Benoa



3. Finalisasi dokumen Kerjasama antara BPPMHKP dengan AP2HI



4. Penyusunan Juknis Sertifikasi CPIB dan Digitalisasi Layanan sertifikat CPIB melalui SIAPMUTU



5. ToT Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI)



6. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik



7. Monev Sertifikasi CPIB Kapal



8. Helpdesk CPIB



9. Dukungan operasional KNMP



Lampiran Tabel Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu (CPIB) UPT BPPMHKP

No.	Satuan Kerja	CPIB Kapal
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	89,33
2	Balai PPMHKP Medan I	70,00
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	85,83
4	Balai PPMHKP Lampung	70,00
5	Balai PPMHKP Jakarta	90,00
6	Balai PPMHKP Semarang	90,00
7	Balai PPMHKP Surabaya II	70,00
8	Balai PPMHKP Entikong	65,00
9	Balai PPMHKP Balikpapan	90,00
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	89,67
11	Balai PPMHKP Tarakan	70,00
12	Balai PPMHKP Denpasar	90,00
13	Balai PPMHKP Mataram	70,00
14	Balai PPMHKP Makassar	90,00
15	Balai PPMHKP Manado	90,00
16	Balai PPMHKP Ambon	88,75
17	Balai PPMHKP Jayapura	65,00
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	70,00
19	Stasiun PPMHKP Medan II	90,00
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	70,00
21	Stasiun PPMHKP Padang	85,00
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	85,00
23	Stasiun PPMHKP Jambi	70,00
24	Stasiun PPMHKP Palembang	66,67
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	83,33
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	70,00
27	Stasiun PPMHKP Batam	65,00
28	Stasiun PPMHKP Merak	70,00
29	Stasiun PPMHKP Bandung	65,00
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	65,00
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	88,33
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	70,00
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	65,00
34	Stasiun PPMHKP Kupang	70,00
35	Stasiun PPMHKP Bima	65,00
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	65,00
37	Stasiun PPMHKP Palu	65,00
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	90,00
39	Stasiun PPMHKP Kendari	90,00

40	Stasiun PPMHKP Bau - Bau	88,33
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	65,00
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	65,00
43	Stasiun PPMHKP Ternate	65,00
44	Stasiun PPMHKP Sorong	70,00
45	Stasiun PPMHKP Merauke	65,00
		75,89

Link Lampiran Perhitungan :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0-wXvNfSoX-0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtopof=true&sd=true

Interprestasi hasil terhadap tingkat pengendalian dan pengawasan mutu

- Nilai ≥ 85 Sangat Efektif
- Nilai 72- 84 Efektif
- Nilai 56 - 71 Cukup Efektif
- Nilai ≤ 55 Kurang Efektif

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Monev / Supervisi Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Tangkapan dan Monitoring Perairan	2026 (TW II – TW IV)
Dukungan operasional KNMP	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Tangkapan dan Monitoring Perairan	2026 (TW II – TW IV)
Penandatanganan PKS antara BPPMHKP dan AP2HI	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Tangkapan dan Monitoring Perairan	2026 (TW II – TW IV)
Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik	Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Tangkapan dan Monitoring Perairan	2026 (TW II – TW IV)

Tabel 3.6 Pencapaian IKU 5

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK.5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB											
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	150,7	72	72	75,89	105,4	105,4	72	105,4	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I sebesar 150,7%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 72%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 75,89%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 105,4%.

IKU 6. Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI

Perairan Laut

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur, ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 187 tahun 2023 tentang Pelabuhan Pangkalan Pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan Yang Telah Memenuhi Syarat Untuk Penarikan Pasca Produksi. Pada regulasi tersebut ditetapkan 6 zona PIT yang meliputi 296 pelabuhan pangkalan. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6 tahun 2025 tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan dinyatakan bahwa bahan baku tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian melalui monitoring perairan.

Hasil tangkapan dari 6 zona PIT tersebut perlu dijamin mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga diperlukan data dan informasi terkait kondisi kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya, racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan dan residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*) pada lingkungan perairan agar berjalan efektif serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. Untuk menunjang hal tersebut dilakukan pengambilan dan pengujian terhadap contoh ikan dan hasil perikanan lainnya yang diambil dari perairan. Hasil pengujian dari monitoring kesegaran ikan, residu bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxin*) pada lingkungan perairan digunakan sebagai jaminan bahwa pemerintah menjamin hasil perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia bebas dari bahan kimia berbahaya dan racun hayati laut (*marine biotoxine*), selain itu Unit Pengolahan Ikan memerlukan hasil monitoring perairan sebagai jaminan kepada negara tujuan ekspor terhadap produk yang diekspor.

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Lokasi									
Target	8							4	8
Realisasi	8							4	
%Capaian	100%							100%	
Nilai pengawasan mutu									
Target	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	-	71%
Realisasi	100%								
%Capaian	91,67%								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi keberhasilan target

Indikator keberhasilan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer dilakukan dengan dua cara metode perhitungan yaitu lokasi dan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI. Cara pengukuran untuk metode penghitungan pertama yaitu lokasi dengan menghitung jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI. Penghitungan kedua yaitu nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI dengan menghitung jumlah pengujian yang dilakukan dibandingkan jumlah hasil pengujian yang memenuhi standar (%) dan Skor jumlah pengujian yang dilakukan dibandingkan dengan skor maksimal pengujian yang wajib dilakukan. Kedua jumlah metode perhitungan tersebut dengan target capaian minimal 71%.

Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah RI dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap cemaran marine biotoxin dan bahan kimia berbahaya di perairan. Capaian pada triwulan I dilakukan terhadap 8 lokasi, yaitu wilayah perairan Sorong, Makassar, Lampung, Tanjung Balai Asahan, Pontianak, Surabaya, Manado, dan Ambon. Berdasarkan hasil tersebut, nilai pengawasan mutu perairan yang dilaksanakan pada triwulan I pada 8 lokasi sebesar 91,67% (target tercapai).

Tindakan / Upaya yang telah dilaksanakan disertakan foto

1. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran *marine biotoxine* dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan. Pada triwulan I kegiatan pengawasan dilakukan oleh UPT perairan Sorong, Makassar, Lampung, Tanjung Balai Asahan, Pontianak, Surabaya, Manado, dan Ambon. Dokumentasi sebagai berikut:

- a. BPPMHKP Sorong



- b. BPPMHKP Makassar



c. BPPMHKP Lampung



d. BPPMHKP Tanjung Balai Asahan



e. BPPMHKP Pontianak



f. BPPMHKP Surabaya I



g. BPPMHKP Manado



h. BPPMHKP Ambon



2. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran *marine biotoxine* dan/atau bahan kimia berbahaya 8 (delapan) lokasi perairan.
 - a. Sorong
Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Raja Ampat dan TPI Pasar Waisai. Jenis ikan yang diambil adalah kerapu dan kerang. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, logam berat (merkuri, timbal, kadmium), *ciguatoxin* dan *biotoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk parameter mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat, *ciguatoxin* dan *biotoxin* dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 100%.
 - b. Makassar
Lokasi pengawasan dilaksanakan di TPI Lappa Sinjai. Jenis ikan yang diambil adalah kerapu, kakap, baronang, dan kakatua. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *ciguatoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk parameter mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat dan *ciguatoxin* dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.
 - c. Lampung
Lokasi pengawasan dilaksanakan di Pesawaran dan Lampung Selatan. Jenis ikan yang diambil adalah Kerang Hijau, Kakap Putih, Cobia, Barakuda dan Kerapu. Parameter pengujian terdiri dari *Salmonella*, *E. coli*, logam berat (merkuri, timbal, kadmium), *ciguatoxin* dan *biotoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium BPPMHKP Lampung untuk parameter mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat, *ciguatoxin* dan *biotoxin* dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 100%.
 - d. Tanjung Balai Asahan
Lokasi pengawasan dilaksanakan di wilayah perairan Asahan, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan. Jenis kerang yang diambil adalah kerang bulu. Pengujian untuk parameter logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *biotoxin* (ASP dan NSP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 100%.
 - e. Pontianak
Lokasi pengawasan dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah dan kerrang dara. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *ciguatoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Pontianak untuk parameter mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat di laboratorium Saraswanti Indo Genetech (SIG), untuk *biotoxin* dan *ciguatoxin* dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi

Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.

f. Surabaya I

Lokasi pengawasan dilaksanakan di Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur. Jenis ikan yang diambil adalah ketamba, kerapu, pinjalo, kakap, Lencam. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, *Vibrio parahaemolyticus*, , logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan ciguatoxin. Pengujian dilakukan di laboratorium BPPMHKP Surabaya I untuk parameter mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam berat dan ciguatoxin dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.

g. Manado

Lokasi pengawasan dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Likupang, Minahasa Utara. Jenis ikan yang diambil Adalah kakatua ,kakap, ekor kuning. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan *ciguatoxin*. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Manado untuk parameter mikrobiologi dan logam berat, sedangkan untuk *ciguatoxin* dilakukan di laboratorium BUSPMHKP. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 83,33%.

h. Ambon

Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Desa Kayeli/Kaki Air Gunung Botak, Pulau Buru. Jenis ikan yang diambil adalah kakatua, kuniran, kerapu, kerang dara, udang windu. Parameter pengujian terdiri dari: *Salmonella*, *E. coli*, *Vibrio parahaemolyticus*. logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan ciguatoxin. Pengujian parameter mikrobiologi di lakukan di laboratorium BPPMHKP Ambon, untuk parameter logam berat dan ciguatoxin dilakukan di laboratorium BUSPMHKP, sedangkan untuk kualitas air di Balai Budidaya Air laut Ambon. Hasil Pengujian semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang dipersyaratkan. Nilai pengawasan mutu sebesar 100%.

3. Nilai pengawasan mutu perairan secara keseluruhan:

- a. Kegiatan pengawasan dilakukan di 8 (delapan) Lokasi perairan, sehingga memberikan dampak pengawasan mutu residu, cemaran bahan berbahaya hasil kelautan dan perikanan serta racun hayati laut (*marine biotoxin*) sangat representative sebagai jaminan keamanan produk yang diekspor ke negara tujuan bebas dari cemaran bahan berbahaya. Semakin banyak wilayah perairan yang dilakukan monitoring, berdampak kepada tingginya nilai pengawasan mutu perairan terhadap cemaran bahan berbahaya atau racun hayati laut di Perairan Indonesia.
- b. Nilai pengawasan mutu untuk capaian triwulan I tahun 2026 merupakan penjumlahan dari 8 (delapan) dengan hasil nilai akhir 91,67% (tercapai dengan target 71%).
- c. Walaupun target tercapai, perlu ada peningkatan dalam pelaksanaan monitoring yaitu pengujian yang membutuhkan biaya cukup besar dan

keterbatasan kemampuan laboratorium BPPMHKP untuk mampu melakukan pengujian yang dipersyaratkan (seperti logam berat, ciguatoxin dan biotoxin). Saat ini hanya BUSPMHKP yang mampu melakukan uji ciguatoxin dan biotoxin, sedangkan uji logam berat hanya dapat dilakukan oleh laboratorium BUSPMHKP dan BPPMHKP Makassar. Atas hal ini perlu dilakukan sosialisasi kepada UPT BPPMHKP dan koordinasi dengan Sekretariat BPPMHKP untuk penambahan ruang lingkup parameter pengujian sehingga UPT mampu secara mandiri melakukan pengujian tersebut.

DATA PERHITUNGAN NILAI PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER DI WILAYAH RI									
No	UPT	PERHITUNGAN NILAI PENGAWASAN MUTU PERAIRAN LAUT							Nilai Total = $\frac{(A+B)}{2} \times 100$
		Perairan Laut (10 parameter uji)	Jumlah Pengujian yang memenuhi syarat	Jumlah Pengujian yang dilakukan	Nilai A = $\frac{A1}{A2} \times 100$	Skor Jml pengujian	Skor Maksimal Pengujian	Nilai B = $\frac{(B1/B2)}{100}$	
		Jumlah Pengujian	A1	A2		B1	B2	Skor	
1	Surabaya I	7	7	7	100	2	3	66,67	83,33
2	Ambon	10	10	10	100	3	3	100,00	100,00
3	Makassar	6	6	6	100	2	3	66,67	83,33
4	Manado	6	6	6	100	2	3	66,67	83,33
5	Lampung	9	9	9	100	3	3	100,00	100,00
6	Sorong	8	8	8	100	3	3	100,00	100,00
7	Tanjung Balai Asahan	8	8	8	100	3	3	100,00	100,00
8	Pontianak	7	7	7	100	2	3	66,67	83,33
NILAI JAMINAN MUTU									91,67

Perairan Darat

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu Cemaran Bahan Berbahaya pada Perairan Umum di WPP-NRI Perairan Darat. Kegiatan ini difokuskan pada pemantauan residu bahan berbahaya seperti cemaran mikrobiologi, logam berat, antibiotik, serta pestisida di perairan umum (danau, sungai, dan waduk) yang merupakan sumber utama produksi perikanan. Melalui monitoring yang terukur dan sistematis, diharapkan dapat diperoleh gambaran kondisi mutu lingkungan perairan sebagai dasar pengendalian risiko sejak tahap hulu.

Isu utama yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini adalah belum adanya pengawasan mutu wilayah perairan darat sebagai sumber produksi perikanan di Indonesia khususnya sektor budidaya, tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran limbah, penggunaan bahan kimia yang tidak bijak di sekitar lokasi yang berpotensi menjadi residu, serta perubahan ekosistem perairan semakin meningkatkan potensi cemaran di perairan darat, sehingga menuntut pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif.

Implikasi dari kondisi tersebut dapat mempengaruhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak tahap produksi primer. Keberadaan residu bahan berbahaya berpotensi menyebabkan penurunan kualitas produk, meningkatkan risiko penolakan di pasar ekspor, serta

berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan pada tahap awal dapat menghambat efektivitas Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKHP) yang seharusnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dalam mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya kebijakan Ekonomi Biru, kegiatan monitoring ini berperan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Pengawasan residu cemaran pada perairan darat menjadi instrumen penting untuk memastikan praktik perikanan yang bertanggung jawab, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Dengan demikian, indikator kinerja yang ditetapkan diimplementasikan melalui kegiatan monitoring yang mampu memberikan data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu di sektor produksi primer.

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	-	71%
Realisasi	45,83%								
%Capaian	64,55%								

Berdasarkan pelaksanaan monitoring yang telah dilakukan UPT, maka diperoleh capaian sebagai berikut.

1. UPT BPPMHKP Medan I – Danau Toba

- Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tanggal 6 – 7 Februari 2026.
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder meliputi pemerintah daerah (dinas ketahanan pangan dan perikanan Kab. Toba dan Kab. Simalungu) serta pihak swasta PT. Aquafarm Nusantara.
- Pengujian yang dilakukan meliputi E.coli, salmonella, logam berat (Pb, Cd, Hg), residu antibiotik (kloramfenikol, metabolit nitrofurantoin) untuk sampel ikan mas dan ikan nila, pengujian E.coli, salmonella, logam berat (Pb, Cd, Hg), dan residu pestisida (DDT, endrin) untuk sampel air.
- Seluruh pengujian dilakukan (A2 = 9) dan seluruh hasil pengujian memenuhi standar (A1 = 9), serta skor jumlah pengujian (B1 = 3) dan skor maksimal (B2 = 3).
- Maka nilai A = 100, B = 100, sehingga nilai pengawasan = 100%
- Secara umum pelaksanaan kegiatan monitoring berjalan optimal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas pengujian.

2. UPT BPPMHKP Pontianak – Sungai Mempawah

- Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Maret 2026.
- Kolaborasi dengan berbagai stakeholder meliputi pemerintah daerah (Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah) serta penyuluh perikanan Kab. Mempawah

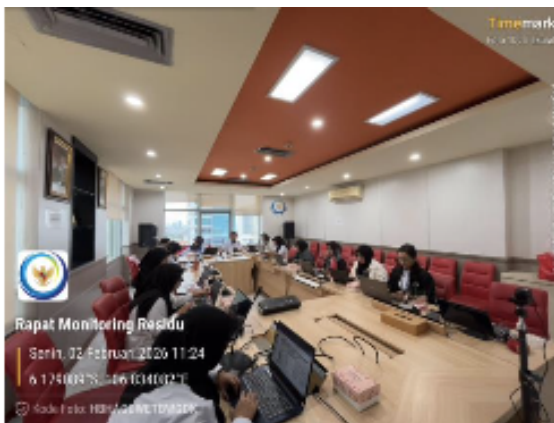
- Pengujian yang dilakukan meliputi logam berat (Pb, Cd, Hg), residu antibiotik (kloramfenikol) untuk sampel ikan nila, pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) untuk sampel air.
 - Seluruh pengujian dilakukan ($A_2 = 4$) dan seluruh hasil pengujian memenuhi standar ($A_1 = 4$), serta skor jumlah pengujian ($B_1 = 2$) dan skor maksimal ($B_2 = 3$). Maka nilai $A = 100$, $B = 66,67$, sehingga nilai pengawasan = $83,33\%$
 - Secara umum pelaksanaan kegiatan sudah baik, namun cakupan parameter pengujian belum sepenuhnya terpenuhi.
3. UPT SPPMHKP Bandung – Waduk Cirata/Jatiluhur
- Kegiatan tidak terlaksana akibat kendala cuaca dan prioritas kegiatan lain.
 - Maka nilai pengawasan 0% .
4. UPT Balai Besar PPMHKP Surabaya I – Waduk Karangates
- Kegiatan ditunda ke Triwulan II karena kendala lapangan dan beban prioritas kegiatan lain.
 - Maka nilai pengawasan 0% .

Dari 4 target lokasi monitoring perairan darat, hanya 2 lokasi yang melaksanakan monitoring (Medan I dan Pontianak), sehingga nilai total pengawasan menjadi $45,83\%$, masih di bawah target 71% . Rendahnya capaian ini terutama disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan pada 2 UPT (Bandung dan Surabaya I), yang secara signifikan menurunkan rata-rata penilaian.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan indikator sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan monitoring di seluruh lokasi. Ketidakterlaksanaan di beberapa UPT langsung berdampak besar terhadap capaian kinerja secara agregat, meskipun lokasi lain telah mencapai nilai optimal.

Tindakan/Upaya yang telah dilaksanakan beserta foto

1. **Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Monitoring Residu Cemaran Bahan Berbahaya di Perairan Laut Zona PIT dan Perairan Umum WPP NRI Perairan Darat**
Dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2026 di Ruang Rapat Pusat Manajemen Mutu GMB II, Lantai 10



2. **Pelaksanaan Monitoring Residu dan Bahan Berbahaya (UPT Medan I dan Pontianak)**

UPT Medan I dan Pontianak telah melaksanakan kegiatan monitoring di lokasi yang telah ditetapkan, meliputi pengambilan sampel ikan dan/atau air, serta pengujian parameter mikrobiologi, logam berat, antibiotik, pestisida, dan racun hayati laut. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku serta melibatkan instansi terkait di daerah.



3. **Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Daerah**

Dalam pelaksanaan monitoring, dilakukan koordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan daerah, penyuluh perikanan, serta pelaku usaha untuk mendukung kelancaran pengambilan sampel dan validitas data.



4. **Penjadwalan Ulang Kegiatan Monitoring (UPT Bandung dan Surabaya I) Terhadap UPT yang belum melaksanakan kegiatan pada Triwulan I, telah dilakukan penjadwalan ulang ke Triwulan II dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, kesiapan lapangan, dan ketersediaan anggaran.**

5. **Optimalisasi Sumber Daya dan Prioritas Kegiatan**

UPT melakukan penyesuaian prioritas kegiatan dengan tetap memastikan layanan utama seperti pengujian laboratorium, sertifikasi mutu, dan dukungan ekspor tetap berjalan, tanpa mengabaikan target pengawasan yang akan dipenuhi pada periode berikutnya

6. **Percepatan dan Perencanaan Teknis**

Dilakukan percepatan proses administrasi, penyusunan rencana sampling, serta kesiapan logistik untuk mendukung pelaksanaan monitoring pada Triwulan berikutnya agar lebih efektif dan efisien.

No	UPT	PERHITUNGAN NILAI PENGAWASAN MUTU PERAIRAN DARAT							
		Perairan Darat (10 parameter uji)	Jumlah Pengujian yang memenuhi syarat	Jumlah Pengujian yang dilakukan	Nilai A = (A1/A2) *100	Skor Jumlah Pengujian	Skor Maksimal Pengujian	Nilai B = (B1/B2)* 100	Nilai Total = ((A+B)/2)* 100
		Jumlah Pengujian	A1	A2		B1	B2		
1	Medan I	9	9	9	100	3	3	100,00	100,00
2	Bandung	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Pontianak	4	4	4	100	2	3	66,67	83,33
4	Surabaya I	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
NILAI JAMINAN MUTU									45,833333
Total Nilai jaminan mutu		=	Nilai jaminan mutu perairan laut + Nilai jaminan mutu perairan darat						
			12 lokasi						
		=	76,39						

Tabel 3.7 Pencapaian IKU 6

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK. 6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI										
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	71	71	76,39	107,59	107,59	71	107,59

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 - 2029 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 71%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 76,39%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 107,59%.

IKU 7. Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam kerangka sistem jaminan mutu kelautan dan perikanan merupakan instrumen hukum dan teknis utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan serta mengawasi mutu dan keamanan pangan hasil perikanan.

Instrumen ini disusun dan dikelola oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) selaku otoritas kompeten demi memastikan seluruh produk perikanan (baik hulu maupun hilir) memenuhi standar pasar domestik maupun global.

Komponen Utama NSPK Sistem Jaminan Mutu

- **Norma:** Aturan dasar atau panduan makro regulasi yang ditetapkan kementerian sebagai payung hukum utama
- **Standar:** Spesifikasi teknis atau ambang batas mutu baku, mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau regulasi internasional (seperti ketentuan batas cemaran logam berat dan bakteri).
- **Prosedur:** Tata cara langkah demi langkah dalam pelaksanaan teknis, mulai dari proses budidaya, penangkapan, pengolahan, pengujian laboratorium, hingga alur penerbitan sertifikasi mutu.
- **Kriteria:** Tolok ukur, parameter, atau indikator penilaian kelayakan untuk menentukan apakah suatu produk atau pelaku usaha berhak menerima sertifikat jaminan mutu.

Fungsi Strategis NSPK bagi Sektor Perikanan

- **Amanat Undang-Undang:** Menjadi instrumen legalisasi perizinan berusaha berbasis risiko sesuai koridor UU Cipta Kerja.
- **Harmonisasi Global:** Memastikan sistem penjaminan mutu Indonesia diakui (*mutual recognition*) oleh negara tujuan ekspor di Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya.
- **Acuan Daerah:** Menjadi pedoman wajib bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan pelaku usaha skala kecil dan menengah.

T/R	Tahun 2026							Capaian Th.2025	Target Th. 2026
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
%Capaian	-	-	-	-	-	-	-	-	

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Melakukan peningkatan kompetensi 2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang bertanggungjawab terhadap regulasi pelaksanaan Sertifikasi pada Pusat Mutu Produksi Primer	➤ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pakan dan Obat Ikan ➤ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Budi Daya ➤ Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Tangkapan dan Monitoring Perairan	Triwulan I sd IV tahun 2026

Tabel 3.8 Pencapaian IKU 7

SP.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan										
IK. 7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi										
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 1 kebijakan NSPK. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 0%

3.2.2

Sasaran Strategis 2

Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan

IKU 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 01 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I.

LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 86%.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:
 $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindak lanjuti oleh unit eselon I
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Tabel. 3.9 Pencapaian IKU 8

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 8		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	100	86	86	100	116,27	116,27	86	116,27

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I sebesar 100%. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 86%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100%. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 sebesar 116,27%.

IKU 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas Laporan Keuangan (LK) BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung tercapainya pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan target Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tidak melebihi 1 %.

$$\text{Formulasi : Batas Tertinggi Presentase} = \frac{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas LK 2021}}{\text{Realisasi Riil TA.2021}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator kinerja ini akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2026. Pada Manual IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer sumber data diperoleh dari BPPMHKP dengan jenis perhitungan data sama persis dan metode *cascading* adopsi langsung. Dengan kata lain indikator ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPMHKP sehingga pencapaian indikator ini pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mengikuti hasil perhitungan pencapaian indikator BPPMHKP.

Tabel. 3.10 Pencapaian IKU 9

SP.2 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan												
IK. 9 Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer												
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 100%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU 10. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki :

- Perjanjian Kinerja
- Manual IKU
- Rincian Target IKU
- Rencana Aksi
- Laporan Kinerja Intern
- Laporan Kinerja
- Dokumen Data Dukung LKj

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut, serta membandingkan hasil yang ada di dalam dokumen dengan hasil yang telah diinput ke dalam aplikasi kinerjajaku.

Tabel. 3.11 Pencapaian IKU 10

SP.2 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan											
IK.10 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer											
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	86,20	-	-	-	-	86,20	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 86,20%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

IKPA bertujuan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran sehingga bisa menjamin anggaran menjadi kredibel dan akuntabel. Pengukuran kinerja ini kemudian berguna untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, dan kegiatan yang dijalankan suatu instansi pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai peran strategis, menjadi motor penggerak atas keberhasilan dalam pencapaian IKPA Satuan Kerja (Satker). KPA harus bisa mengelola sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. Mulai dari Unit Perencana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran (BPg), Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Pekerjaan/Barang/Jasa, Unit Pelaksana Kegiatan, dan Unit Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan. Untuk memperoleh nilai IKPA secara optimal diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dari seluruh sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga aspek dan delapan indikator penilaian dalam IKPA Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- 1 Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA dengan bobot 10%. Untuk aspek ini, Satker meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan dan meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja dalam tiap bulan.

- 2 Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan indikator yang terdiri dari penyerapan anggaran dengan bobot 20%, belanja kontraktual dengan bobot 10%, penyelesaian tagihan dengan bobot 10%, pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 5%, dan Dispensasi SPM dengan bobot 5%. Untuk aspek ini, mendorong satuan kerja meningkatkan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan per jenis belanja, meningkatkan percepatan belanja kontraktual sejak awal, meningkatkan ketepatan waktu serta optimalisasi penggunaan dan pertanggungjawaban UP dan TUP, dan meningkatkan kualitas ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja serta mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
- 3 Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator Capaian Output dengan bobot 25%, aspek ini mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output secara berkualitas, dimana capaian output ini adalah cerminan kinerja suatu instansi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Tidak hanya dari sisi kualitas penyerapan anggaran semata tetapi dari berbagai aspek dan indikator sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian perlu kerja sama yang solid antar pengelola keuangan dalam internal Satker tersebut untuk dapat mewujudkan optimalnya nilai IKPA.

Tabel. 3.12 Pencapaian IKU 11

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan										
IK. 11		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer										
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	92,1	-	-	-	-	92,1	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 92,1%. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU 12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi:

- a. Capaian keluaran pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata-rata secara geometrik perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
- b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
- c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui:

- 1 Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM);
- 2 Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D);
- 3 Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Tabel. 3.13 Pencapaian IKU 12

SP.2	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan											
IK. 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer											
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra	
-	-	-	-	-	81,75	-	-	-	-	81,75	-	

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2026 sebesar 81,75. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 belum tersedia hingga akhir tahun.

IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang palingrendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat;
- 6) Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

1. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
2. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
3. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
4. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);

5. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/sederajat;
 6. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan dibawah SLTA.
- b. Dimensi kompetensi.
- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

1) Diklat Kepemimpinan.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

2) Diklat Fungsional.

Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3) Diklat Teknis.

Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum

mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;

- c) Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir. Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- 1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 2. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b) Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c) Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- e) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- 1. Hukuman disiplin ringan;
- 2. Hukuman disiplin sedang;
- 3. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a) Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b) Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c) Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
- d) Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin yang diatas yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

- a. 91 - 100;
- b. 81 - 90;
- c. 71 - 80;
- d. 61 - 70; dan
- e. 60 ke bawah.

Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah : a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91- 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71-80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala 1(satu) kali setiap tahunnya.

Tabel. 3.14 Pencapaian IKU 13

SP.2		Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan									
IK. 13		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer									
Realisasi Tahun 2025 - 2029					Tahun 2026					Renstra BPPMHKP 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target Renstra	% Capaian thd Target Renstra
-	-	-	-	-	82,5			-	-	82,5	-

Seperti pada tabel capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pusat Mutu Produksi Primer diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja tahun 2025 pada triwulan I belum tersedia. Target indikator capaian tahun 2025 sebesar 87. Capaian realisasi indikator pada triwulan I tahun 2026 belum tersedia dikarenakan bersifat tahunan. Persentase realisasi capaian indikator tahun 2026 terhadap target 2026 belum tersedia hingga akhir tahun.

Realisasi Anggaran

Kinerja keuangan Pusat Mutu Produksi Primer sampai triwulan 1 tahun 2026 mencapai Rp. 269.710.167,- atau 16,06% dari pagu anggaran awal Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp. **2.168.430.000,-** .

Adapun faktor – faktor yang menjadi kendala dalam hal penyerapan anggaran pada periode Triwulan I antara lain :

Blokir anggaran pada pagu anggaran kegiatan Pusat Mutu Produksi Primer sebesar Rp 489.170.000,-, sehingga alokasi yang dapat dipergunakan sebesar Rp. 1.679.673.000,-

Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CAK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i)} \times 100$$

E = Efisiensi
 PAK_i = Pagu anggaran keluaran i
 RAK_i = Realisasi anggaran keluaran i
 CAK_i = Capaian keluaran i

Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perluskala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{2}\right) \times 100$$

NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

Karena mengacu pada pelaksanaan 1 DIPA, dimana pagu anggaran Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer menjadi satu kesatuan dengan Sekretariat BPPMHKP, maka dari formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran BPPMHKP pada Tahun 2025

sebesar 3,39% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BPPMHKP sebesar 58,47% dari skala maksimal 100%. Hal ini membuktikan BPPMHKP sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Pusat Mutu Produksi Primer merupakan salah satu unit eselon eselon II pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pada bidang manajemen mutu lembaga inspeksi dan lembaga penguji, standardisasi sistem serta kepatuhan.. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Mutu Produksi Primer berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra BPPMHKP dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja (Lkj) Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2026. Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada tahun 2026, lebih disebabkan oleh kendala non teknis, seperti alokasi blokir yang baru dapat digunakan pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada tahun berkenaan.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusat Mutu Produksi Primer, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya.

Kesimpulan

1. Secara umum rata-rata NPSS pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 108,8%, dimana terdapat 5 IKU (75%) yang pencapaiannya memenuhi target, 2 IKU (25%) yang pencapaian target tidak terpenuhi dan 6 IKU yang pencapaian didapat pada akhir tahun

Rekomendasi

1. Setiap penanggung jawab kegiatan pada Pusat Mutu Produksi Primer agar selalu memonitor pelaksanaan kegiatan, terutama terkait terdapatnya automatic adjustment pada masing – masing kegiatan yang dilaksanakan.
2. Setiap unit kerja agar melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek aspek yang dinilai dapat berpotensi menghambat capaian kinerja yaitu pada
 - a. IKU Tingkat Efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB- CDOIB , dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 69,56% dimana target indikator dimaksud sebesar 75%.
 - b. IKU Tingkat Efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPPIB, dimana pada penyajian laporan kinerja ini tidak terpenuhinya target IKU yang dimaksud yaitu hanya tercapai sebesar 69,22% dimana target indikator dimaksud sebesar 75%.
3. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap ketua tim kerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal;dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Data Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3860527
LAMARAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hatta Arisandi
Jabatan : Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB (%)	71
		2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	70
		3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	75
		4	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen pakan ikan yang menerapkan CPPIB (%)	75
		5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha penangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	72
		6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI (%)	71
		7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi (Kebijakan)	1
SK. 2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	86
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	100
		10	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	86,20
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	92,1
		12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	81,75
		13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	82,5

Data Anggaran :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	
Total Anggaran Pusat Mutu Produksi Primer Tahun 2026		6,950,000,000

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer



Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

2. Link drive data dukung

Rekapitulasi realisasi Anggaran Kegiatan Proiritas Pusat Mutu Produksi Primer

No	Kegiatan	
1	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha budidaya yang menerapkan CBIB (%)	https://drive.google.com/file/d/1USQIkDcCTrzzMnCO-Kfl_Q5O9KoVOEnD/view?usp=sharing
2	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha pembenihan ikan yang menerapkan CPIB (%)	https://drive.google.com/file/d/120FZP0JeAR4hS8z43mcEdYA2vSM73OfB/view?usp=sharing
3	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha produsen dan distributor obat ikan yang menerapkan CPOIB-CDOIB (%)	https://drive.google.com/file/d/11BRoZoBo0HKofwpgqfJ9J6B3e6PquJ4j/view?usp=sharing
4	Tingkat Efektivitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Pada Unit UsahaProdusen Pakan Ikan yang Menerapkan CPPIB (%)	https://drive.google.com/file/d/1PKeBdZ30hYbJg5EN2Y-FePfFVyxjnlrn/view?usp=sharing
5	Tingkat efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usahapenangkapan atau pengangkutan ikan yang menerapkan CPIB (%)	https://drive.google.com/file/d/1WRJrgInDr7AYnac6yYC2sS_T9odAsoJx/view?usp=sharing
6	Nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI	https://drive.google.com/drive/folders/1iyv0HyRZj05y40iARjQgMXm_MFNsY9PF?usp=sharing
7	Kebijakan Teknis (NSPK) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor mutu produksi primer yang tervalidasi	-
8	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Pusat Mutu Produksi Primer	https://drive.google.com/file/d/1CYwCmrCGjIYzbzGeKGzy2M8caHTJO-PY/view?usp=sharing
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (nilai)	-
13	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer (%)	-